



Jangan Hanya untuk Masuk Sekolah Negeri

KETUA Komisi D DPRD Kota Yogya, Suryani, mengatakan, warga yang tidak masuk dalam daftar penerima KMS tidak perlu khawatir, mengingat Pemkot tetap menaruh kepedulian. Bahkan, ia berani menjamin hak seluruh penduduk terkait pendidikan maupun kesehatan, bakal dipenuhi pemerintah.

"Jadi, KMS itu jangan dijadikan tujuan untuk masuk sekolah negeri. Kalau memang harus sekolah swasta, kami bersama eksekutif sudah mempersiapkan skema bantuan yang dapat diakses, kan," tandasnya, kemarin.

Dia menjelaskan, skema tersebut an-

taranya lain, bantuan tunggakan SPP yang 2022 silam dianggarkan sampai Rp1 miliar, hingga bantuan ijazah tertinggal dengan alokasi maksimal Rp6 juta. Kemudian, masih ada pula bantuan operasional sekolah daerah (bosda) swasta dengan alokasi Rp2,25 juta, hingga Rp 4,5 juta per siswa per tahun, menyesuaikan jenjang sekolahnya.

"Beberapa skema bantuan itu, semuanya bisa diakses, terutama soal tunggakan SPP. Jadi, silakan diajukan, nanti diverifikasi sama dinas," ungkapnya.

Terlebih, Suryani menyebut, kuota ja-

lur afirmasi di jenjang SMP pun sebenarnya tak terlalu banyak, atau hanya di kisaran 11 persen, serta harus diperebutkan para pemegang KMS di Kota Yogya. Alhasil, daripada mengandalkan status keluarga miskin, lebih baik anak-anak dipacu semangat bersaingnya guna menembus jalur mutu dan prestasi yang telah disediakan.

"Tapi, ketika menilai ada pemegang KMS yang tidak tepat sasaran, silakan laporkan saja ke instansi terkait dan disertai bukti, agar intervensi dari pemerintah itu benar-benar tepat sasaran," lanjutnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005